



PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

JL. H. AGUS SALIM, KOTA BARU JAMBI

TELP. 0741 – 41092, 40131, 445559

FAX. 0741 – 445293

Home Page : www.pta-jambi.go.id E-mail : pta-jambi@yahoo.com

Nomor : W5-A/1226 /PP.01.3/IX/2021
Sifat : Penting
Lampiran : 3 Eksamplar
Perihal : Undangan Diseminasi dan Bimbingan Teknis
Penanganan Bantuan Teknis Hukum dalam
Masalah Perdata untuk Hakim, Panitera dan
Jurusita di Wilayah Hukum Jambi

30 September 2021

Kepada Yth
Ketua Pengadilan Agama
Se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan akan diadakannya Diseminasi dan Bimbingan Teknis Penanganan Bantuan Teknis Hukum dalam Masalah Perdata untuk Hakim, Panitera dan Jurusita di Wilayah Hukum PTA Jambi yang diadakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (surat undangan terlampir), maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara untuk dapat mengikuti dan memerintahkan kepada Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Panitera Pengganti dan Jurusita/JurusitaPengganti yang ada pada satker saudara, untuk mengikuti kegiatan dimaksud, yang akan dilaksanakan pada:

1. Waktu Penyelenggaraan :

Hari/tanggal : Jum'at/1 Oktober 2021

Waktu : Jadwal terlampir

2. Metode Penyelenggaraan :

Telekonferensi menggunakan aplikasi zoom :

Meeting ID : 946 1487 1582

Password : 755693

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalam
Ketua,

Dr. Drs. H. Pelmizar, M.H.I./✓
NIP. 19561112 198103 1 009

Tembusan :

1. Yth. Panitera Mahkamah Agung RI
2. Yth. Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI



PANITERA MAHKAMAH AGUNG RI

Jalan Medan Merdeka Utara No. 9-13 Telp. (021) 3843348, 3810350, 3457661

Tromol Pos No.212 Jakarta 10010

Website : <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>

Nomor : 2093 /PAN/PP.01.3/9/2021

29 September 2021

Lampiran : Agenda Kegiatan

Perihal : Undangan Diseminasi dan Bimbingan Teknis
Penanganan Bantuan Teknis Hukum dalam
Masalah Perdata untuk Hakim, Panitera dan
Jurusita di Wilayah Hukum Jambi dan Sumatera
Selatan

Kepada Yth.

1. Ketua Pengadilan Tinggi Jambi;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Selatan;
5. Para Ketua Pengadilan Negeri se-wilayah hukum Jambi;
6. Para Ketua Pengadilan Negeri se-wilayah hukum Sumatera Selatan;
7. Para Ketua Pengadilan Agama se-wilayah hukum Jambi;
8. Para Ketua Pengadilan Agama se-Wilayah hukum Sumatera Selatan.

Dengan ini kami sampaikan bahwa Kepaniteraan Mahkamah Agung bekerjasama dengan Direktorat Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri akan menyelenggarakan kegiatan Diseminasi dan Bimbingan Teknis Penanganan Bantuan Teknis Hukum dalam Masalah Perdata untuk hakim, panitera dan jurusita pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding, yang akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Waktu Penyelenggaraan:

Hari/tanggal : Jum'at/ 1 Oktober 2021

Waktu : Terlampir

2. Metode Penyelenggaraan:

Telekonferensi menggunakan aplikasi zoom:

Meeting ID : 946 1487 1582

Password : 755693

3. Susunan Acara : Terlampir

4. Peserta :

- a. Hakim, Panitera dan Jurusita seluruh pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama se-wilayah hukum Jambi dan Sumatera Selatan;
- b. Pengadilan dapat mengikuti kegiatan ini secara individual (satu orang satu akun) atau kolektif (di ruang pertemuan).

Berdasarkan hal tersebut, agar saudara menugaskan peserta untuk mengikuti kegiatan dimaksud. Informasi lebih lanjut mengenai kegiatan tersebut diatas dapat

menghubungi Sdri. Wardhani (WA: 081295793655), Sdr. Arif Fadhillah (WA: 081381212900) pada Kepaniteraan MA dan Sdri. Yustisia Pramesti (WA: 087824463666) pada Kemlu email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id dan kepaniteraan.mari@gmail.com.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



DR. RIDWAN MANSYUR, S.H., M.H.

Tembusan:

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Direktur Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya Kemlu.

AGENDA DISEMINASI DAN BIMBINGAN TEKNIS VIRTUAL

DISEMINASI DAN BIMBINGAN TEKNIS PENANGANAN BANTUAN TEKNIS HUKUM DALAM MASALAH PERDATA UNTUK HAKIM DAN PANITERA SE-WILAYAH HUKUM PROVINSI JAMBI DAN SE-WILAYAH HUKUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO.	WAKTU	KEGIATAN	NARA SUMBER/ PENANGGUNG JAWAB
1.	Jum'at, 1 Oktober 2021 08.00 – 08.15	Pengantar dan Pembukaan	Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional
2.	Jum'at, 1 Oktober 2021 08.15 – 08.45	Paparan I	Direktur Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya
3.	Istirahat 08.45 – 09.00	-	-
4.	Jum'at, 1 Oktober 2021 09.00 – 09.30	Paparan II	Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
5.	Jum'at, 1 Oktober 2021 09.30 – 11.30	Tanya Jawab Sesi	
6.	Jum'at, 1 Oktober 2021 11.30 – 11.45	Penutup	

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

“RAPAT KOORDINASI TIM PENANGANAN PERMINTAAN BANTUAN TEKNIS HUKUM DALAM MASALAH PERDATA DAN DISEMINASI PENANGANAN BANTUAN TEKNIS HUKUM DALAM MASALAH PERDATA KEPADA PEJABAT PENGADILAN DI WILAYAH JAMBI DAN SUMATERA SELATAN”

DIREKTORAT JENDERAL HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Sentul, 29 September – 2 Oktober 2021

I. Latar Belakang

1. Sebagai tindak lanjut penandatanganan Nota Kesepahaman antara MA dan Kemlu tentang Penanganan Bantuan Teknis Hukum dalam Masalah Perdata (berserta dengan Keputusan Bersama dan tiga Perjanjian Kerja Sama) pada 20 Februari 2018, Penandatanganan 3 (tiga) kerja sama pada 20 Februari 2019, serta peluncuran *Website Rogatory Online Monitoring*, dan sesuai dengan mandat Keputusan Bersama tentang Pembentukan Tim Penanganan Bantuan Teknis Hukum dalam Masalah Perdata, perlu kiranya tindak lanjut untuk memastikan implementasi kesepakatan kerja sama tersebut.
2. Dalam pelaksanaannya, Nota Kesepahaman bertindak sebagai pedoman koordinasi antara Kementerian Luar Negeri dan Mahkamah Agung untuk menindaklanjuti permintaan *judicial assistance* di bidang perdata dari pemerintah negara lain yang bersifat lintas yurisdiksi. Untuk mendukung efektifnya Nota kesepahaman serta Perjanjian-Perjanjian Kerjasamanya tersebut, telah dibentuk Tim Penanganan Bantuan Teknis Hukum Dalam Masalah Perdata yang diberikan amanat untuk melakukan pertemuan rutin berkala setiap 2 (dua) bulan atau secara khusus bila diperlukan. Tim sebagaimana dimaksud mempunyai tugas antara lain:
 - a. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman;
 - b. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis, termasuk bagi pejabat pengadilan di Indonesia;
 - c. menindaklanjuti amanat yang ditetapkan dalam Nota Kesepahaman;
 - d. melakukan pemutakhiran terhadap aplikasi *Rogatory Online Monitoring*.

3. Pada tanggal 5 – 8 April 2021 telah diselenggarakan Rapat Tim Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum dalam Masalah Perdata yang membahas praktik penanganan rogatori dengan Mahkamah Agung di antaranya penggunaan website ROM, penanganan Rogatori Masuk; dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Mahkamah Agung dan Kementerian Luar Negeri. Dari pertemuan tersebut, telah diinventarisir beberapa permasalahan berkaitan dengan praktik penanganan permintaan bantuan teknis hukum dalam masalah perdata yang dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri dan Mahkamah Agung.
4. Guna kompleksitas dan permasalahan teknis yang timbul dari penyampaian dokumen pengadilan dalam masalah perdata lintas negara, serta untuk melakukan *review* berkala dalam pelaksanaan ketentuan Nota Kesepahaman dan Perjanjian-Perjanjian Kerjasamanya, diperlukan koordinasi berkelanjutan dari anggota Tim yang terdiri dari perwakilan dari Kementerian Luar Negeri dan Mahkamah Agung sehingga dapat terlaksana pemberian bantuan hukum dalam masalah perdata yang cepat, tepat dan efisien bagi masyarakat pencari keadilan.

II. Tujuan

Persoalan penanganan rogatori dan penyampaian dokumen pengadilan lintas negara merupakan ranah hukum perdata yang beraspek internasional karena memiliki unsur asing. Oleh karena itu, pelaksanaan evaluasi terhadap Nota Kesepahaman Rogatori berikut dengan perjanjian-perjanjian turunannya secara berkala bertujuan untuk:

1. Mendukung dan memperkuat pelaksanaan bantuan teknis hukum dalam masalah perdata lintas negara melalui penerusan dokumen pengadilan Indonesia kepada pengadilan asing dan penerusan dokumen pengadilan asing kepada pengadilan Indonesia.
2. Mendukung citra penegakan hukum di Indonesia dimana citra penegakan hukum di Indonesia menjadi salah satu indikator *ease of doing business* Bank Dunia.
3. Merealisasikan pelaksanaan program Percepatan Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri periode 2021 - 2024 dalam bidang pembentukan norma hukum melalui pelaksanaan bantuan teknis hukum dalam masalah perdata lintas negara.
4. Melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya untuk memperkuat kebijakan di bidang hukum privat internasional.
5. Menyelenggarakan fungsi Direktorat Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya dalam penyiapan dan pelaksanaan perumusan pembentukan dan penyempurnaan norma hukum privat internasional.

Guna mencapai tujuan tersebut, Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri c.q. Direktorat Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya berkepentingan untuk melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan *stakeholders* terkait dalam melakukan evaluasi dan pembahasan terhadap isu-isu penting yang dihadapi.

III. Tempat Dan Waktu Kegiatan

Kegiatan Rapat Koordinasi Tim Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum dalam Masalah Perdata dan Diseminasi Penanganan Bantuan Teknis Hukum Dalam Masalah Perdata kepada Pejabat Pengadilan (hakim, panitera dan juru sita) di Wilayah Jambi dan Sumatera Selatan ini rencananya akan dilaksanakan di Sentul, Jawa Barat pada tanggal 29 September – 2 Oktober 2021.

Kegiatan akan diselenggarakan secara *hybrid* di Jawa Barat dengan memperhatikan protokol kesehatan. Bentuk kegiatan secara *hybrid* akan menghadirkan Tim Rogatori dari Mahkamah Agung dan Kementerian Luar Negeri di tempat kegiatan, sedangkan para peserta mengikuti kegiatan secara daring

IV. Peserta, Narasumber, Dan Agenda

Kegiatan ini akan dibagi dalam 2 agenda utama, yaitu Sesi pertama: Rapat Koordinasi Tim Penanganan Bantuan Teknis Hukum dalam Masalah Perdata yang akan menghadirkan sekitar 15 peserta dari satker terkait di Kemenlu, dan Mahkamah Agung dan Sesi kedua: Diseminasi Penanganan Bantuan Teknis Hukum Dalam Masalah Perdata kepada Pejabat Pengadilan di wilayah Jambi dan Sumatera Selatan yang akan menghadirkan sekitar 75 peserta.

V. Anggaran

Anggaran pelaksanaan kegiatan akan dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional T.A. 2021

Jakarta, September 2021

AGENDA

**“RAPAT KOORDINASI TIM PENANGANAN PERMINTAAN
BANTUAN TEKNIS HUKUM DALAM MASALAH PERDATA DAN DISEMINASI
PENANGANAN BANTUAN TEKNIS HUKUM DALAM MASALAH PERDATA KEPADA
PEJABAT PENGADILAN DI WILAYAH JAMBI DAN SUMATERA SELATAN”
DIREKTORAT JENDERAL HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL
Sentul, 30 September - 1 Oktober 2021**

Kamis, 30 September 2021

- 08.30 - 09.00 Registrasi Peserta Rapat (yang hadir fisik)
- 09.00 - 09.30 Pengantar dan Pembukaan Rapat Tim Rogatori
Panitera Mahkamah Agung RI
- 09.30 - 09.45 *Coffee Break*
- 09.45 - 12.00 Rapat Sesi I
Pembahasan tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi Tim Penanganan Bantuan
Teknis Hukum dalam Masalah Perdata dan Materi Diseminasi Penanganan
Bantuan Teknis Hukum dalam Masalah Perdata
- 12.00 - 13.30 ISHOMA
- 14.30 - 14.45 *Coffee Break*
- 13.30 - 16.00 Rapat Sesi II
Pembahasan Persiapan bahan perpanjangan Nota Kesepahaman
Kementerian Luar Negeri – Mahkamah Agung

Jumat, 1 Oktober 2021

- 07.30 - 08.00 Registrasi (Peserta yang hadir fisik)
- 08.00 - 08.15 Pengantar dan Pembukaan
Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional
- 08.15 - 08.45 Paparan I
Direktur Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya
- 08.45 - 09.00 *Coffee Break*
- 09.00 - 09.30 Paparan II
Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
- 09.30 - 11.30 Tanya Jawab Sesi
- 11.30 - 11.45 Penutup